

AS, Indonesia, dan Koalisi Global: Memerangi Jejaring Teroris Internasional¹

Victor Silaen

Abstrak

Tulisan ini mendiskusikan masalah global yang dihadapi hampir semua negara dewasa ini yakni teroris dan terorisme. Keduanya harus dihadapi secara sangat serius dengan tindakan-tindakan konkret dan bukan cuma lips service belaka. Dan perang melawan teroris adalah perang yang tak bisa hanya dilakukan di medan perang, melainkan di berbagai bidang: jalur diplomasi, kerjasama intelijen, koalisi berbagai negara melawan kelompok-kelompok teroris, pembekuan aset finansial milik kelompok-kelompok teroris, hingga pencegahan imigrasi ilegal.

Penulis kemudian mengusulkan perlunya dibuat jejaring kegiatan kontraterorisme guna memerangi teroris internasional yang juga memiliki jejaring.

Kata kunci: teror, teroris, Indonesia, Amerika Serikat, internasional.

Pendahuluan

Penjara adalah suatu masyarakat tertutup, suatu institusi total. Apa yang terjadi di dalam dinding penjara tidak dengan mudah dapat dipelajari oleh orang luar dan apa yang terjadi di dalam sel seringkali tidak diketahui oleh petugas. Kehidupan narapidana dalam penjara diyakini sebagai suatu kehidupan yang keras, dimana narapidana sering kali menjadi korban. Kekerasan tersebut antara lain berupa gangguan dari sesama narapidana seperti pemerasan, penganiayaan, tindakan brutal, prasangka, stres, dan aneka ketegangan dalam kehidupan penjara.

Beberapa negara pun telah menjawabnya. Jenderal Pervez Musharraf, dari Pakistan, langsung menutup ratusan madrasah Islam

dan menangkap ribuan orang. Begitupun Singapura yang menangkap belasan tokoh Jamaah Islam (JI) yang diduga menjadi cabang Al-Qaeda dan berniat meledakkan instalasi AS di negeri itu. Tak ketinggalan pula Filipina dan Malaysia, yang melakukan hal serupa, setelah mendapat pasokan informasi dari intelijen AS.

Tapi, ada dugaan, banyak rezim di Asia dan Timur Tengah memilih berpihak kepada AS bukan karena mereka takut ancaman Washington, melainkan karena berpikir bahwa mereka bisa mengambil keuntungan dari kampanye antiteror yang dipimpin AS, yang dianggap dapat membuka peluang bagi penindasan kebebasan sipil di berbagai belahan dunia. Demikian bunyi kesimpulan Human Rights Watch dalam laporan tahunan

mereka yang terbit akhir Januari lalu (*Tempo*, edisi 28 Januari-3 Februari 2002). Artinya, para sultan dan raja di Timur Tengah punya alasan kuat membungkam setiap aspirasi demokratis. Jenderal Musharraf dan Mahathir Mohammad (Malaysia) menemukan tangan lebih digdaya untuk melibas oposisi. Presiden Arroyo (Filipina) punya dalih membiarkan pasukan AS datang ke negerinya, setelah keluar dari Subic dan Clark beberapa tahun silam, dengan dalih membasmi gerakan separatist Moro.

Potensi Teroris di Indonesia

Indonesia sendiri, bagaimana? Sejumlah kalangan militer kini merindukan bantuan AS yang terhenti sejak kasus Timor Timur. Maka, Kepala Badan Intelijen Nasional Hendropriyono pun seolah menggaungkan suara Paul Wolfowitz, pejabat Pentagon, tentang kehadiran Al-Qaeda di Indonesia. Ia lalu bersuara lantang menyebut sejumlah kelompok radikal di Indonesia yang diduga memiliki jejaring dengan Al-Qaeda. Tapi, pernyataan itu segera dibantah oleh pelbagai pihak. Apalagi, konon pihak Bank Indonesia tak menemukan sedikit pun indikasi adanya aset finansial jejaring Al-Qaeda itu di negara ini.

Perkembangan berikutnya, Menteri Senior Singapura Lee Kuan Yew tiba-tiba saja melontarkan pernyataan yang membuat banyak pihak di Indonesia seolah menjadi merah telinganya. Menurut Lee, negerinya masih potensial menjadi sasaran serangan teroris karena pemimpin-pemimpin sel jejaring teroris itu masih bebas berkeliaran di

Indonesia. Sebagai respon atas pernyataan itu, dengan serta-merta beberapa kelompok keumatan di Indonesia melakukan aksi unjukrasa di depan Kedubes Singapura, Jakarta, akhir Februari lalu. Mereka antara lain adalah Laskar Mujahidin dan Front Pembela Islam (*Kompas*, 26-2-2002). Pertanyaannya, mengapa mereka reaktif sekali sementara pemerintah Indonesia sendiri terkesan tak peduli atau lamban bersikap?

Beberapa kemungkinan bisa diajukan sebagai jawabannya. Pertama, karena mereka segera memunculkan identitas dirinya yang primordialistik sebagai umat Islam, yang lalu diperbandingkan dengan para tersangka teroris yang notabene adalah umat Islam juga. Artinya, dalam konteks ini, mereka merasa tersinggung karena lebih menekankan identitas keagamaannya daripada melihat perbuatan para tersangka teroris itu. Dengan kata lain, di dalam diri mereka segera muncul solidaritas lintas-negara yang didasari kesamaan identitas (agama), meski barangkali kenal pun tidak terhadap para tersangka teroris itu. Kedua, boleh jadi mereka memang memiliki keterkaitan dengan jejaring teroris tersebut, baik langsung maupun tidak. Dan karena itulah maka mereka langsung bersikap reaktif demi menutupi fakta yang sebenarnya.

Padahal, pernyataan Lee itu, kendati harus diakui agak tendensius dan berdampak negatif bagi citra Indonesia, mestinya disikapi secara arif dan proporsional semisal mengajukan pertanyaan resmi (untuk meminta klarifikasi) kepada menteri

senior negara tetangga itu. Di samping itu, justru sebenarnya kita bisa menjadikannya sebagai masukan berharga guna melakukan langkah-langkah konkret seperti mengidentifikasi, mencari, dan lalu menindak tegas kelompok-kelompok teroris itu – jika memang benar ada di Indonesia.

Lagi pula, sebenarnya kita memang harus bertanya jujur kepada diri sendiri: tak mungkinkah jejaring teroris internasional itu ada di Indonesia? Kalau tidak, mengapa ada banyak orang Indonesia yang disangka atau diduga terkait dengan Al-Qaeda?

Sebutlah, misalnya, Agus Budiman yang tertangkap dan kini ditahan di AS lantaran memalsukan dokumen bagi beberapa tersangka teroris "911" itu. Lalu, ada Fathur Rahman Al-Ghozi yang ditangkap polisi Filipina akhir Januari lalu karena memiliki 1 ton bahan peledak. Menurut polisi, pria yang oleh pers asing dijuluki "Mike The Bomb Maker" itu dicurigai terlibat dalam peledakan di stasiun Metro Manila beberapa waktu silam. Ghozi, yang diduga terkait dengan gerakan radikal di Indonesia, Malaysia, dan Filipina, dikenal sebagai konsultan peledakan bagi gerakan Islam Moro. Sebelumnya, pemuda kelahiran Desa Mojorejo, Madiun, yang pernah kuliah di Pakistan itu tercatat sebagai santri Pondok Pesantren Islam Al-Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, pimpinan Abu Bakar Ba'asyir.

Lantas, benarkah Ghozi dan Ba'asyir terlibat gerakan radikal Islam di Malaysia? Ba'asyir, yang juga Ketua Majelis Syuro Majelis Mujahidin Indonesia, mengaku memiliki jejaring dengan Hambali,

yang sebelumnya tertangkap di Malaysia. Sedangkan Ghozi mengakui bahwa ia terlibat dalam perencanaan pengeboman stasiun kereta api Metro Manila setahun silam (saat itu korban tewasnya sebanyak 22 orang), yang pendanaannya dibantu oleh ekstremis muslim setempat dan asing (*Suara Pembaruan*, 28-2-2002). Adapun motifnya adalah sebagai balasan atas ofensif militer Presiden Joseph Estrada terhadap kamp-kamp Front Pembebasan Islam Moro (atau yang dikenal dengan akronim MILF) di Filipina Selatan. Ghozi mengaku bekerja sama dengan Hambali dari Indonesia dan berkomplot dengan Muklis Yunos, anggota MILF, sejumlah muslim Filipina, Ridwan Isamuddin dari Indonesia, dan Fais Abu Bakar Bafana dari Malaysia. Ia ditangkap atas petunjuk polisi Singapura. Pemuda yang memiliki beberapa paspor palsu ini diduga pemimpin utama JI, berbasis di Asia Tenggara, yang diduga memiliki jejaring dengan kelompok Al-Qaeda. JI sendiri diduga memiliki jejaring sel-sel di Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan keterangan dari 13 anggotanya yang tertangkap di Singapura, 8 orang di antaranya konon pernah mendapat latihan dari Al-Qaeda di Afghanistan. Tuduhan terhadap mereka adalah merencanakan pengeboman terhadap beberapa kepentingan AS dan beberapa instalasi penting lainnya di Singapura.

Sementara dari Filipina, muncullah informasi dari Kepala Imigrasi Filipina, Andrea Domingo, bahwa penguasa tiga negara (Filipina, Singapura, dan Malaysia) sudah melihat kemungkinan

terlibatnya jejaring Al-Qaeda untuk membentuk Uni Islam atau Darul Islamiyah Nusantara yang mencakup Malaysia, Indonesia, dan Filipina Selatan (*Suara Pembaruan*, 4-3-2002).

Dari negara itu pula berita teranyar yang mengejutkan pun muncul. Pada 13 Maret lalu, tiga tersangka WNI, yakni Tamsil Linrung (mantan Bendahara Umum PAN yang juga anggota Majelis Syuro KPPSI - Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam), Agus Dwikarna (Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Wakil Ketua KPPSI, dan Koordinator Laskar Jundullah), dan Abdul Jammal Balfas (pengusaha), yang diduga berkait dengan kelompok Al-Qaeda tertangkap di Manila, Filipina, dengan tuduhan membawa bahan peledak secara ilegal di dalam koper mereka. Pihak kepolisian setempat mengatakan bahwa mereka telah mengamati ketiga tersangka itu dan ternyata mereka berhubungan dengan seorang tersangka anggota JI yang juga WNI, yakni Fathur Rahman Al-Ghozi, yang telah tertangkap sebelumnya (*Suara Pembaruan*, 16-3-2002). Siaran pers setempat menyebutkan bahwa Agus Dwikarna adalah tersangka utama di balik lima pengeboman berantai yang mengguncang Manila pada 30 Desember 2000.

Meski kita masih harus menunggu tuntasnya proses hukum terhadap para tersangka teroris itu, tapi berdasarkan fakta-fakta tersebut, bisakah kita membantah tegas perihal adanya jejaring teroris internasional di negeri ini? Menurut saya tidak. Apalagi pemerintah Indonesia memang tak menunjukkan

sikap tegas terhadap para migran asing (misalnya dari Afghanistan) yang tiba-tiba saja diketahui sudah ada di beberapa daerah di negeri ini (contohnya di Maluku, Sulawesi, Jawa, dan lainnya).

Kemungkinan adanya kelompok-kelompok teroris di Indonesia sebenarnya sudah sejak lama dapat diduga. Setidaknya hal itu dapat dilihat dari peristiwa pengeboman terhadap gereja dan bangunan-bangunan lainnya, yang sudah berulang kali terjadi.

Bukti-bukti yang memperkuat dugaan itu akhirnya terungkap juga setelah tertangkapnya pelaku pengeboman pusat belanja di Atrium Senen, Jakarta, Agustus 2001. Tersangka bernama Dani alias Dodi, yang bernama asli Taufik Abdul Halim, itu ternyata adalah seorang warganegara Malaysia, anggota Kelompok Mujahidin Malaysia, yang setelah masuk ke Indonesia secara ilegal bersama 10 warga Malaysia lainnya kemudian bergabung dengan Laskar Jihad Mujahidin di Maluku. Pemuda yang diduga anggota teroris internasional ini pernah tinggal di Pakistan selama tiga tahun dan mengaku benci kepada kaum nasrani (*Tempo* edisi 20-26 Agustus 2001). Dalam keterangannya yang lain, ia juga mengaku bahwa peledakan bom di Gereja Santa Anna, Jakarta Timur, sepekan sebelumnya, merupakan hasil kerja kelompoknya.

Oleh kepolisian Malaysia, ia diduga menjadi pendukung gerakan Islam Moro di Filipina. Sementara menurut pemimpin Laskar Jihad Ahlussunah Wal Jamaah, Jafar Umar Thalib, Kelompok Mujahidin Malaysia itu telah masuk jejaring Al-

Qaeda pimpinan Osama bin Laden. Ia kemungkinan besar juga memiliki hubungan dengan Iqbaluzzaman, pelaku pengeboman gereja-gereja di Malam Natal 2000 yang juga pernah aktif dalam kelompok Negara Islam Indonesia (NII). Sedangkan Iqbal diduga memiliki hubungan dengan Hambali, warga negara Indonesia yang bermukim di Malaysia, yang merupakan otak peledakan bom itu.

Lalu, adakah hubungan mereka dengan tokoh Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Bakar Baasyir? Pemimpin sebuah pondok pesantren di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang pernah dipenjara karena tuduhan terlibat Komando Jihad yang ingin mendirikan NII pada 1978 dan pernah menetap di Malaysia ini menampiknya. Lalu, apa tujuan kelompok Majelis Mujahidin Malaysia? Dengan membuat kekacauan di Malaysia, Filipina, dan Indonesia, mereka ingin mendirikan Negara Daulah Islam Nusantara (*Tempo* edisi 3-9 September 2001).

Upaya AS Memerangi Teroris Internasional

Setelah "Peristiwa 911", ternyata aksi-aksi teroris terhadap AS masih juga terjadi. Beberapa waktu lalu (2002), misalnya, Kedubes AS di Italia menjadi target serangan teroris, yang diduga terkait dengan kelompok Al-Qaeda. Hal itu didasarkan temuan adanya gorong-gorong mencurigakan yang terarah ke kantor Kedubes itu. Berikutnya, sebuah gereja di Pakistan dibom dan menewaskan beberapa orang AS, bahkan salah seorang di antaranya adalah istri diplomat AS di negara itu.

Mudah diduga, kemarahan AS terhadap para teroris tersebut kian menjadi-jadi. Dan karena itulah keinginan dan upayanya memberantas jejaring teroris internasional niscaya tak surut dan berhenti dalam waktu cepat.

Di Afghanistan sendiri, sejak 13 Maret 2002, operasi militer pasukan keamanan internasional yang didukung Dewan Keamanan PBB kemudian beralih pimpinan ke tangan Kanada. Bernama "Operasi Harpoon", operasi tersebut bertujuan untuk menumpas sisa-sisa pejuang Taliban di Afghanistan, setelah "Operasi Anakonda" yang dipimpin AS selama 12 hari berakhir. Sejak 20 Desember 2001, DK PBB sudah mengerahkan 5000 personil pasukan multinasional (dari AS, Kanada, Inggris, Perancis, Australia, Denmark, Jerman) dengan pimpinan yang berganti-ganti, untuk menciptakan keamanan di Afghanistan selama enam bulan. Batas waktu itu ditentukan sendiri oleh Hamid Karzai, pemimpin sementara pemerintahan Afghanistan. Menurut Sekjen PBB Kofi Annan, pada April nanti, pimpinan pasukan akan beralih ke tangan Turki (*Suara Pembaruan*, 14-3-2002).

Dalam rangka itu, Presiden George W. Bush secara proaktif memprakarsai pertemuan negara donor di Jepang guna mengumpulkan dana semacam "Marshall Plan" untuk Afghanistan. Maksudnya, sekarang mengebom dulu, nanti baru membangun. Jadi, jika Al-Qaeda dan Osama bin Laden sudah dihancurkan, dan rezim Taliban sudah digusur dari Kabul, Afghanistan, pun segera dibangun

menjadi negara yang aman, stabil, dan demokratis. Dan hal itu tentu merupakan pekerjaan raksasa yang butuh biaya besar. Tapi, bagi Bush, itulah bukti tanggungjawab AS terhadap Afghanistan.

Akan halnya Wakil Presiden Dick Cheney, pada 16 Maret 2002 mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Arab yang tegas menentang kelompok fundamentalis Islam. Perlawanan yang terjadi di Timur Tengah terhadap beberapa kelompok Islam saat ini, tidak karena adanya serangan teroris "911" atau serangan serupa di Mesir, Arab Saudi, dan Suriah pada beberapa dekade lalu. Banyak pemimpin Arab yang pernah bertemu Cheney menyodorkan sebuah solusi untuk mengatasi masalah kelompok Islam radikal ini, yakni penggabungan antara tindak kekerasan jika dibutuhkan dan akomodasi jika memungkinkan.

Akomodasi terhadap kelompok fundamentalis Islam merupakan kebutuhan yang cukup penting untuk negara-negara di kawasan. Lagi pula, kepercayaan atau iman merupakan sesuatu yang utama. Karena agama menjadi tujuan dan cara hidup negara-negara di Timur Tengah. Keberlangsungan agama merupakan dasar untuk pemerintahan atau politik Islam dan sudah terbentuk sejak berabad-abad lampau.

Fanatisme agama juga terbentuk sebagai respon terhadap kolonialisme dunia Barat. "Pemakaian agama untuk tujuan politik sudah dilakukan sejak dulu kala," ujar Dia'a Rashwan, ahli kelompok Islam dari Pusat Studi Strategi dan Politik Al-ahram, Kairo,

seperti dikutip *Suara Pembaruan* (16-3-2002). Menurut dia, ketika kelompok radikal itu ingin membentuk Negara Islam, mereka serta-merta mengangkat senjata dan melawan pemerintah.

Di Mesir, satu-satunya negara Arab yang sangat populer dan menjadi sekutu dekat AS, Presiden Gamal Abdul Nasser pernah memenjarakan sekitar 20.000 anggota kelompok fundamentalis Islam pada 1950-an sampai 1960-an. Saat ini pun, Presiden Hosni Mubarak menggunakan pendekatan keamanan untuk menindak tegas kelompok milisi Islam, terutama mereka yang berbuat kekacauan pada 1990-an.

Di Yordania, Kuwait, dan Yaman, kelompok fundamentalis Islam sengaja dilibatkan dalam arus utama politik pemerintahan. Tujuannya, untuk menenteramkan anggota kelompok mereka dan sebagai kesempatan menjelaskan gambaran tentang proyek demokrasi. "Suara kelompok Islam itu didengar oleh berbagai pihak, termasuk parlemen, partai politik, dan media massa," kata ahli politik dari Yordania, Hani Hourani, seperti dikutip *Suara Pembaruan* (16-3-2002). "Saat ini, kecenderungan umum yang terlihat begitu moderat," ujarnya lebih lanjut. Banyak muslimat kelas menengah mengembangkan pakaian khusus yang menutupi rambut dengan kerudung, dan baju dirancang panjang hingga tungkai kaki.

Di Arab Saudi, negara yang kaya dengan minyak bumi dan tempat lahirnya agama Islam, warga masyarakat akan berhenti bekerja ketika mendengar gema azan dari

mesjid-mesjid. Kendati begitu, mereka masih toleran terhadap berbagai aturan yang menyangkut pakaian wanita, menonton televisi, dan film-film Barat. Di Sudan, ketika pemerintahan Islami berkuasa pada 1989, implementasi hukum Islam yang menjadi simbol sebuah rezim perlahan-lahan dilonggarkan.

Kembali pada Cheney, kabar terakhir menyebutkan bahwa upayanya mengajak negara-negara Arab memerangi Irak ternyata gagal. Tapi, kenapa Irak harus diperangi? Jawabannya, karena negara ini adalah "musuh" lama AS dan Osama bin Laden sendiri pernah bekerja sama dengan rezim di negara ini untuk melawan AS. Tak heran kalau AS juga menduga Irak (selain Al-Qaeda) berada di belakang "Peristiwa 911" itu.

Terlepas dari kegagalan itu, dapat dikatakan AS betul-betul serius untuk menumpas siapa saja yang dianggap teroris atau mendukung dan melindungi teroris. Jika dulu AS melaksanakan Politik Pembendungan (*Containment Policy*) guna memberantas komunis dan komunisme, kini ia melaksanakan Politik Pembendungan Baru (*New Containment Policy*) terhadap teroris dan terorisme. Jika dulu AS mengembangkan Doktrin Pembendungan dan Pencegahan (*Containment and Deterrence*), maka saat ini ia mengembangkan Doktrin Ofensif yang menggunakan pola serangan dini (*preemptive attack*) dan intervensi defensif (*defensive intervention*) demi memerangi musuh barunya.ⁱⁱ

Berkat pengaruhnya yang besar di dunia, maka dalam waktu

relatif singkat terbentuklah koalisi global melawan teroris. Buktinya, PBB telah merumuskan Resolusi No. 1373 yang dianggap resolusi paling komprehensif sebagai batu pijakan menghadapi aksi teroris global. Resolusi yang mengikat 189 negara itu mewajibkan negara-negara anggota PBB untuk mencari, menghukum, atau mengekstradisi teroris yang ditemukan di wilayahnya. Resolusi itu juga mengundang negara-negara untuk saling bertukar informasi mengenai jejaring teroris dan membekukan aset maupun membendung dananya.ⁱⁱⁱ

Indonesia sendiri kemudian sibuk menyusun RUU anti-terorisme setelah wacana soal ini bergulir cukup lama. Terkesan para elit politik di negara ini kesulitan mendefinisikan apa itu teror dan terorisme serta siapa itu teroris. Padahal, sebenarnya konsep ini tak terlalu sulit untuk didefinisikan. Karena, setidaknya ia bisa dilihat dari cara dan tujuannya. Dalam hal cara, tindakan atau aksi yang dilakukan selalu "lewat belakang" alias sembunyi-sembunyi. Sedangkan dalam hal tujuan, yang ingin dicapai adalah membuat orang banyak (utamanya warga sipil) menjadi panik, takut, bingung, stres, dan yang sejenisnya. Sebab, jika hal itu terjadi, dengan sendirinya produktivitas kerja sehari-hari akan menurun hingga akhirnya terjadi krisis berkepanjangan menuju kehancuran.

Dengan definisi tersebut, bisakah aksi-aksi militeristik AS terhadap rezim Taliban dan kelompok Al-Qaeda dikategorikan sebagai terorisme? Agaknya tidak,

karena AS melakukannya "lewat depan" dan tujuannya pun bukan untuk menimbulkan kehancuran di Afghanistan (meski secara riil berdampak demikian). Apalagi, AS sendiri kemudian memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan sebagai bukti konkret tanggungjawabnya.

Dari perspektif Ilmu Komunikasi, sebenarnya aksi teror bisa disejajarkan dengan konsep *psywar*, perang urat-saraf (meski tidak selalu menggunakan kekerasan fisik) demi menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada pihak lain.^{iv} Sementara menurut perspektif Ilmu Hubungan Internasional dikatakan bahwa teror sudah digunakan sejak beberapa dekade lalu untuk mencapai tujuan tertentu, yakni: menakuti, menghancurkan, dan memaksa takluk pihak lawan.

Bentuk teror itu bermacam-macam: teror terhadap kelompok/masyarakat tertentu, terhadap suatu agama, terhadap suatu pemerintah/negara, atau bahkan terhadap dunia. Teroris itu sendiri sudah termasuk aktor hubungan internasional seperti halnya negara, IGO (*inter-governmental organization*), NGO (*non-governmental organization*), dan MNC (*multinational corporation*), individu-individu yang punya kepentingan di negara lain, juga gerakan separatis.^v

Pertanyaannya sekarang, sampai kapankah Doktrin Ofensif terhadap terorisme itu akan terus diimplementasikan? Apakah jika Osama bin Laden menyerah atau tewas dengan sendirinya AS akan menghentikan politik pembendungan barunya itu? Agaknya tidak. Karena,

meski bin Laden gugur bukan berarti Al-Qaeda pun ikut hancur. Apalagi dengan adanya bukti-bukti bahwa jejaringnya sudah semakin tersebar di banyak negara. Bagi AS sendiri, selaku negara yang kerap menjadi korban serangan teroris dan yang puncaknya pada "911" itu dirasakan sangat dahsyat, tentu bukanlah hal yang mudah untuk mengubah suatu kebijakan politik yang didukung oleh Kongres dan negara-negara sekutunya. Pula, ingatlah negara fasisme Jepang, yang luluh-lantak akibat dibombardir AS pada 1945. Meski Jepang takluk, AS masih menginvasinya hingga 1972.

Setelah itu pun, AS masih terus "membayang-bayangi" Jepang dengan kekuatan militernya yang secara khusus ditempatkan di Okinawa hingga kini, di samping melarang negeri sakura ini membangun kekuatan militernya sendiri. Mengapa demikian? Sebagai negara adidaya, AS jelas tak ingin "dipecundangi" oleh negara manapun. Jika pada 1941 Jepang pernah menyerang AS di Pearl Harbour, Hawaii, maka peristiwa traumatik itu tak sekali-kali akan dibiarkannya terulang. Maka, begitu pulalah kiranya sikap AS terhadap terorisme, yang pada 11 September 2001 sudah menimbulkan kepanikan, kegoncangan, dan kerugian mahabesar di dalam negeri. Tak cukup waktu tahunan untuk dapat memulihkannya kembali. Apalagi, jika dikaitkan dengan kepentingan AS untuk "membuat dunia ini aman bagi demokrasi". Maka, disebabkan hal itulah AS kemudian memperluas aksinya di Asia Tenggara.

AS memang memiliki alasan kuat untuk mewaspadai Asia Tenggara berdasarkan bukti-bukti dan data-data intelijen yang dimilikinya perihal keterkaitan jejaring Al-Qaeda di sejumlah negara di kawasan ini. Bagi AS, terlepas dari Perang Dingin dan Peristiwa 911 itu, kawasan Asia Tenggara memang bermakna penting bagi strategi globalnya. Sebelum memiliki pangkalan militer di Filipina, kapal-kapal AS telah lalu-lalang di perairan Asia Tenggara. Hal itu berlangsung jauh sebelum armada AS yang dipimpin Commodore Perry tiba di Jepang, 1853, untuk memaksa negara itu meninggalkan politik isolasinya.^{vi}

Catatan sejarah menyebutkan, pada era 1600-an sudah ada kontak-kontak tak resmi antara orang-orang Amerika (sebelum menjadi AS) dengan orang-orang Nusantara (kelak menjadi Indonesia) di bidang perdagangan. Pada 1802, sebanyak 30 kapal dagang AS tiba di Sumatra. Sedangkan di Filipina, kehadiran AS dimulai pada 1898 setelah AS berhasil mengalahkan Spanyol. AS mengambil-alih Pangkalan AL Subic 1903 dan meresmikan Pangkalan AU Clark sebagai daerah cadangan militer. Lokasi yang pernah digunakan sebagai pangkalan militer AS ini ditemukan oleh salah satu detasemen yang tergabung dalam Pasukan Kavaleri ke-5 pimpinan Jenderal Arthur MacArthur, ayah Jenderal Douglas MacArthur yang pada 1941 bertugas di Filipina dan terkenal dengan ucapan "*I shall return!*" ketika terpaksa mengungsi ke Australia akibat Filipina dikuasai Jepang dalam Perang Dunia II.

Saat Perang Dunia I, Pangkalan AL Subic menjadi fasilitas latihan korps marinir AS terbesar di dunia. Pangkalan militer ini menjadi semakin strategis setelah berakhirnya PD II. Hal ini berkait dengan meningkatnya Perang Dingin antara Blok Barat (AS) dan Blok Timur (Uni Sovyet). Seiring waktu, sebanyak 330 pangkalan dan fasilitas militer AS dibangun di pelbagai pelosok dunia demi membendung komunisme. Sebutlah, antara lain, di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Vietnam Selatan (ditinggalkan pada 1973), Thailand (ditutup pada 1976), dan Filipina (ditutup pada 1992).

Dalam upayanya membendung komunisme, perhatian AS terhadap Indonesia kian meningkat pada dekade 1950-an, dengan terjadinya pemberontakan komunis di Madiun 1948. Karena khawatir negara yang berpolitik luar negeri bebas-aktif ini jatuh ke tangan komunis, AS pun memberikan dukungannya kepada Pemerintah RI. Pun ketika terjadi lagi pemberontakan berdarah pada 1965, AS ditengarai mendukung gerakan "kudeta" angkatan bersenjata karena khawatir Indonesia dikuasai PKI. Bagi AS, Indonesia yang terpecah-belah lebih baik daripada tetap bersatu tapi menjadi komunis. Tertangkapnya Allan Lawrence Pope, penerbang sewaan AS yang membantu pemberontak PRRI/Permesta merupakan bukti keterlibatan negara adidaya ini. Pada 18 Mei 1958, pesawat B-26 yang dipiloti Pope ditembak jatuh di Teluk Ambon.

Kini, sejak musuh AS bertambah dengan bermunculannya

kelompok teroris di mana-mana, perhatian AS terhadap Asia Tenggara pun kembali meningkat. Apalagi dengan ditemukannya bukti-bukti jejaring Al-Qaeda dengan sejumlah kelompok ekstremis radikal di beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Indonesia. Diantara negara-negara tersebut, sayangnya, Indonesia adalah yang dinilai (oleh AS) paling lambat dalam mengambil langkah-langkah konkret memberantas terorisme internasional itu. Bahkan setelah sejumlah tersangka teroris yang berencana menyerang Kedubes AS di Singapura diduga kabur ke Indonesia, pemerintah masih tak berbuat sesuatu pun yang berarti (*Suara Pembaruan*, 28-2-2002).

Tampaknya sikap ekstra hati-hati tersebut dimaksudkan agar tak timbul salah interpretasi dari kelompok-kelompok Islam bahwa mereka diperlakukan secara keras dan tidak dihormati hak-hak asasinya. Tapi akhirnya, sikap itu berubah setelah terjadinya Bom Bali dan Bom Marriott -- dan semakin signifikan setelah Bom Kuningan. Khususnya setelah ledakan Marriott, terdapat wacana untuk menyusun UU seperti ISA (*Internal Security Act*) yang diberlakukan di Singapura dan Malaysia. Meskipun karena banyak ditentang, akhirnya ide itu "dimasukkan ke dalam laci", namun segera dirancang revisi UU 15/2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme; terutama ditujukan terhadap Pasal 25 sampai Pasal 28 tentang peranan intelijen yang akan diperbesar (sehingga boleh menangkap seseorang sampai waktu tertentu untuk mengorek informasi).^{vii}

Perihal Teror, Teroris, dan Terorisme

Di atas telah didefinisikan sedikit perihal teror dan terorisme. Perlu dipahami bahwa tujuan utama aksi teror sebenarnya bukanlah kehancuran harta-benda dan kematian jiwa raga, melainkan efek kengerian, kepanikan, dan trauma yang diharapkan akan semakin menyebarluas melalui diseminasi media massa cetak, elektronik, dan digital. Biasanya aksi tersebut disertai dengan kekerasan fisik, tapi bisa juga dengan kekerasan nonfisik semisal melalui penyebaran virus-virus penyakit berbahaya. Sementara pelakunya kerap bersembunyi, tapi bisa juga sekaligus mengorbankan diri (mati) bersamaan dengan aksi teror yang dilakukannya (yang biasanya dilandasi oleh motif-motif agama).

Para pelaku teror berharap, aksi mereka akan menjadi "tontonan global" yang disaksikan jutaan orang di mana-mana. Karena, semakin banyak dan gencar media massa menyebarluaskannya, semakin dahsyat pula efek negatif yang ditimbulkannya. Jika hal itu tercapai, maka para pelakunya berharap dapat memperoleh "keuntungan politik" (*politicus horribilis*) atau melakukan "pertukaran politik" (*political exchange*) demi mencapai tujuannya (*Kompas*, 21-10-2002).

Terorisme biasanya melibatkan sejumlah orang, tapi hanya dalam kelompok kecil saja. Isme ini meniscayakan kekerasan sebagai jalan untuk mencapai tujuannya, baik yang bersifat politik, agamis, motif balas dendam, dan lain sebagainya.^{viii} Karena itulah ia

juga dapat digolongkan sebagai kekerasan kolektif, sedangkan sebagai kejahatan ia merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Berdasarkan itu, sebenarnya hal yang wajar jika secara yuridis ia harus diperhadapkan dengan produk hukum yang "luar biasa" pula.

Dalam perspektif politik, akar terorisme, salah satunya, adalah ekstremisme (*Kompas*, 15-10-2002). Orang-orang dengan isme ini merasa atau memikirkan dirinya lebih unggul dari orang-orang lain yang tidak sama atau sekelompok dengan mereka. Sebaliknya, mereka memandang orang-orang lain jauh lebih rendah atau dengan cara yang melecehkan. Isme ini tertanam dalam ideologi atau agama (tapi bukan agama *mainstream*, melainkan sempalan atau sekte).

Biasanya mereka adalah orang-orang yang berpikir simplistik, semisal "saya benar dan baik, kamu salah dan jahat". Itulah sebabnya, mereka selalu menutup diri (eksklusif) untuk menerima kebenaran alternatif dari orang-orang lain. Dan karena itulah, demi memperjuangkan kebenaran yang diyakini, mereka tak segan-segan melakukan kekerasan, yang sebenarnya riskan bagi diri sendiri, bahkan jika perlu dengan mengorbankan dirinya sampai mati sebagaimana disebut di atas (ingatlah Peristiwa "911" di Amerika Serikat tahun 2001 dan aksi-aksi bom bunuh diri dalam konflik Israel-Palestina).^{ix}

Faktor lain, yang juga bisa menjadi akar terorisme, adalah cita-cita separatisme dari sekelompok orang (dalam arti, ingin memisahkan diri dari kedaulatan suatu negara).

Karena tidak pernah mendapatkan dukungan atau persetujuan, tidak heran jika gerakan orang-orang yang ingin merdeka ini kerap melakukan aksi-aksi teror untuk memberikan *sign* bahwa mereka tetap eksis dan tak bisa dipandang sebelah mata. Terkait dengan faktor ini, atau juga faktor di atas tadi, terkadang motif dendam atau sakit hati juga bisa memperbesar dorongan bagi sekelompok orang untuk melakukan aksi-aksi teror kepada pihak tertentu yang di masa silam telah menjadi sumber masalah di dalam kehidupan mereka.

Terorisme sebagai Kejahatan Transnasional

Setelah Peristiwa 911 yang menghebohkan dunia itu, tak pelak, terorisme pun segera menjadi sebetulnya kejahatan yang dipersepsikan sebagai kejahatan berlingkup global – melintasi batas-batas negara atau lintas negara (transnasional). Penyebabnya sederhana: 1) karena korbannya adalah AS, negara adidaya yang memiliki kemampuan luar biasa dalam proses pencitraan atau mengangkat suatu isu menjadi sorotan bangsa-bangsa dunia; 2) karena (diduga) pelakunya adalah Al-Qaeda, kelompok teroris yang ditengarai memiliki jejaring sangat luas di berbagai belahan dunia.

Maka, di AS pun kemudian muncullah gagasan tentang Global Terrorism Index, dari sebuah organisasi riset bernama IntelCenter. Ini dimaksudkan sebagai uji coba untuk mengukur tingkat risiko suatu ekonomi nasional dari serangan terorisme (Pamuji, 2003). Sementara negara-negara di kawasan Asia

Tenggara (yang tergabung dalam ASEAN) pun kemudian ikut-ikutan mendukung sikap AS dalam memerangi terorisme. Yakni, dalam bentuk Deklarasi Tindakan Bersama untuk Kontra-Terorisme yang dibuat setelah KTT ASEAN di Brunei, November 2001. Memang, sebagian negara awalnya masih melihat itu sebagai "masalah Amerika, bukan masalah Asia".

Tapi, setelah terjadinya peristiwa Bom Bali 12 Oktober 2002 yang dilanjutkan dengan Bom Marriot 5 Agustus 2003, bangsa-bangsa Asia pun mulai melihat bahwa terorisme merupakan masalah keamanan dalam negeri yang sangat serius, meskipun tetap kritis terhadap versi Amerika mengenai perang melawan terorisme. Di tingkat regional, Bom Bali juga merupakan titik balik penting yang mengubah persepsi politik ASEAN terhadap terorisme. KTT ASEAN di Vietnam tahun 2002, hanya beberapa minggu setelah Bom Bali, menghasilkan kesepakatan yang lebih "keras" mengenai upaya ASEAN menghadapi terorisme.

ASEAN juga berjanji akan mengimplementasikan Resolusi DK-PBB 1373 yang diadopsi tanggal 28 September 2001. Negara yang menjalankan resolusi PBB tersebut akan menjalankan beberapa kebijakan yang berhubungan dengan pembiayaan kegiatan terorisme, menghukum kegiatan penggalangan dana oleh masyarakat yang ditujukan untuk kegiatan yang berhubungan dengan terorisme, serta membekukan aset-aset badan hukum yang berhubungan dengan terorisme.

Dalam resolusi PBB tersebut juga dinyatakan bahwa setiap negara akan melarang warga negaranya menyediakan dana serta berbagai fasilitas yang secara langsung maupun tidak langsung akan menguntungkan terorisme. Sebagai tindakan konkret dari persetujuan ASEAN terhadap Resolusi 1373 itu, ASEAN membentuk kelompok ahli *ad hoc* guna menjalankan Rencana ASEAN untuk Mengatasi Kejahatan Transnasional. Ada delapan kelompok kerja yang dibentuk, salah satunya berhubungan langsung dengan kontraterorisme. Ini dijalankan oleh ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC).

Pada 2002, diselenggarakan pertemuan khusus AMMTC di Kuala Lumpur untuk membicarakan masalah terorisme. Pertemuan itu secara drastis mengubah pendekatan AMMTC dari yang "komprehensif tetapi perlahan-lahan" menjadi terfokus kepada kerja sama kontra-terorisme. Tahun 2003, AMMTC menyelenggarakan serangkaian *workshop* dan *training* dalam bidang keamanan penerbangan (Juli), analisis intelijen (Agustus), investigasi pasca ledakan bom (Oktober), serta identifikasi bom dan bahan peledak (November). Cukup menarik bahwa dalam beberapa kegiatan tersebut, peranan *resource person* dari luar negara ASEAN (terutama AS) makin penting.

ASEAN juga berupaya memperluas jaringan kontra-terorisme melalui forum ARF (ASEAN Regional Forum). Pertemuan ARF ke-9 di Brunei,

misalnya, menghasilkan Deklarasi mengenai Tindakan untuk Melawan Pembiayaan Terorisme. Sementara itu, sejak tahun 2002, Inter-Sessional Group on Confidence Building Measures, ARF, menyelenggarakan serangkaian *workshop* tentang kontra-terorisme yang berlangsung di Honolulu, Bangkok, dan Tokyo. Lokakarya yang pertama di Honolulu berhubungan dengan masalah pembiayaan kegiatan terorisme, sedangkan yang kedua di Bangkok membahas tema-tema umum pencegahan terorisme. Lokakarya yang ketiga di Tokyo lebih spesifik berkaitan dengan pencegahan terorisme dalam *event* internasional, yang berhubungan dengan kegiatan sepakbola Piala Dunia 2002.

Dengan melihat kegiatan yang dilakukan oleh ASEAN itu, secara umum dapat dikatakan bahwa upaya menghadapi terorisme di kawasan ini cukup konkret. Sayangnya, beberapa kasus terorisme yang kemudian masih terjadi (antara lain Kasus Kuningan, 2004) memperlihatkan bahwa upaya-upaya regional itu belum efektif benar. Untuk itu, ada beberapa agenda yang lebih spesifik yang harus dikembangkan bersama, agar di masa mendatang kebijakan kontraterorisme ASEAN lebih efektif.

Salah satu hal pelik dalam kebijakan kontra-terorisme di negara-negara ASEAN terutama berhubungan dengan legitimasi politik (Pamuji, 2004). Masalah legitimasi politik yang utama muncul terutama di negara-negara yang sebagian besar atau memiliki porsi signifikan penduduk muslim. Tak dapat dipungkiri bahwa kebijakan operasional kontraterorisme gaya AS

mendapat banyak kecaman: dari soal penjara Abu Ghraib, perilaku tentara pendudukan AS di Irak, nasib kaum Syiah Irak, sampai ke tuduhan pelanggaran HAM di Teluk Guantanamo, Kuba.^x

Dalam situasi itu, pemerintah di kawasan Asia Tenggara harus menghadapi dua fron, yaitu fron internasional dalam bentuk tekanan AS, serta fron domestik. Akibatnya, sejumlah kebijakan pemerintah dan juga ASEAN kelihatan sebagai "macan kertas". Namun, dengan kasus Bom Bali, Bom Marriott, dan Bom Kuningan, maka dukungan legitimasi politik untuk kebijakan kontra-terorisme yang lebih efektif makin meningkat. Untuk mempertahankan legitimasi politik yang makin kuat itu, persoalan yang penting adalah bagaimana agar membuktikan dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa kebijakan kontra-terorisme ini tidak hanya merupakan fotokopi dari kebijakan AS. Selain itu, penting untuk mengupayakan bagaimana caranya agar Asia Tenggara memiliki konsensus tentang kebijakan kontraterorisme yang berakar dari konteks regional kita sendiri.

Persoalan legitimasi yang kedua terletak pada kenyataan bahwa sebagian besar ancaman keamanan warga negara tidak hanya berasal dari aksi terorisme. Negara yang lemah, reformasi sektor keamanan yang belum terkonsolidasikan secara demokratis, tingginya tingkat kejahatan sosial, lebih merupakan isu keamanan utama di tingkat akar rumput. Ini berarti, isu terorisme hanyalah sesaat dan bersifat lokal; hanya di kota-kota besar yang banyak

kepentingan Barat-nya. Di wilayah lain, isu terorisme seolah tak ada hubungannya dengan persoalan sehari-hari. Padahal, justru masalahnya terletak di sini, karena membuat para aktor teroris bisa dengan leluasa membaaur dengan masyarakat di kota-kota kecil, tanpa diketahui.

Dalam konteks itu, tantangan yang paling besar adalah membuat kebijakan kontra-terorisme yang bernuansa Asia Tenggara serta memasukkan juga unsur-unsur ancaman keamanan yang lebih luas. Tujuannya agar kebijakan kontraterorisme tersebut menjadi semakin relevan dengan muatan dan konteks lokal di kawasan ini. Salah satu caranya adalah dengan mempertinggi keterlibatan masyarakat dalam mendesain dan menjalankan kebijakan kontra-terorisme. Namun, yang terjadi hingga kini barulah pelibatan sebagian masyarakat akademis dalam kebijakan kontraterorisme, melalui berbagai riset.

Sejumlah akademisi di Asia Tenggara memang berhasil untuk mendudukan wacana terorisme internasional dan regional dalam konteks dan persepsi yang tidak harus mengekor cara berpikir AS. Kajian tentang hubungan antara Islam (atau agama secara menyeluruh) dengan terorisme juga bisa dipahami dengan cara yang sangat kontekstual sesuai dengan cara berpikir di Asia Tenggara.

Berbagai studi juga mengungkapkan bagaimana hubungan antara Al-Qaeda dan beberapa organisasi regional yang tidak sesederhana yang dibayangkan oleh media massa

Barat umumnya. Hubungan itu bisa sangat rumit dan tidak selalu bersifat kelembagaan, sehingga untuk setiap pola hubungan tertentu diperlukan pilihan kebijakan kontra-terorisme yang berbeda pula.

Selain keterlibatan dunia akademis sebagai bagian dari "lembaga sipil", desain kebijakan kontra-terorisme yang berbasis akar rumput menjadi sangat urgen. Kelemahan institusi keamanan dan intelijen yang umum terjadi di negara berkembang, bisa diimbangi dengan desain kebijakan yang bertumpu pada sinergi pemerintah dan masyarakat sipil. Inilah sebagian agenda baru yang harus dipertimbangkan secara regional.

Terorisme Baru

Peristiwa 911, tak pelak, telah mengubah pandangan AS secara dramatis terhadap terorisme. Karena, peristiwa tersebut merupakan serangan teroris paling menghancurkan dan paling mematikan di sepanjang sejarahnya. Sejak itu terbukalah mata rakyat dan bangsa AS akan datangnya wajah baru terorisme, yang bertujuan mencapai perubahan dalam skala yang tak pernah terbayangkan oleh teroris tradisional sebelumnya. Terorisme baru itu berusaha mewujudkan redistribusi kekuasaan global dan sebuah revolusi politik yang bisa menghentikan hegemoni AS dan sekutu Barat-nya.

Inilah yang membedakan "terorisme baru" dengan "terorisme tradisional" yang berbentuk pembebasan nasional (*national liberation*) dan yang dilakukan dengan dukungan negara (*state-sponsored*). Terorisme tradisional

menginginkan perubahan politik melalui kekerasan yang terbatas (hindari pertumpahan darah yang banyak dan jatuhnya korban massal). Sebagai contoh, kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris Palestina pada akhir dekade 1960-an dan seterusnya atau yang dilakukan oleh Tentara Republik Irlandia (IRA) pada periode yang sama, yang bertujuan untuk memperoleh simpati internasional. Teror yang dilakukan PLO maupun IRA itu umumnya bertujuan memenangkan diplomasi agar mereka diajak berunding mengubah *status quo*.

Satu hal penting dari strategi itu adalah pembatasan kekerasan dan pencegahan bagi pelaku untuk tidak melakukan tindakan biadab yang bisa mengakibatkan kelompok mereka tidak diikutkan dalam proses perundingan politik. Jadi, bagaimanapun menegangkannya penculikan atlet Israel di Olimpiade Munich atau penyanderaan kapal Achille Lauro oleh teroris tradisional, AS bisa bersikap lebih tenang, karena diyakini kelompok teroris itu tak mau menjadikan dirinya monster yang bisa diburu oleh seluruh dunia untuk dimusnahkan. Justru, kelompok teroris tradisional itu mengejar publikasi untuk memperoleh simpati dan tempat di meja perundingan (Yulianti, 2003).

Terorisme yang didukung oleh negara (*state-sponsored terrorism*) juga membatasi kekerasan yang mereka lakukan. Tujuannya adalah mempengaruhi pengambil kebijakan di AS dan opini publik, namun menghindari kemungkinan pembalasan atau dimulainya sebuah perang. Misalnya, pengeboman

markas militer Khobar Tower di Arab Saudi tahun 1996, yang dilakukan oleh pemimpin garis keras Iran dalam upaya menurunkan dukungan atas keberadaan AS di Teluk Persia. Dengan menjamin bahwa korbannya terbatas dan sulitnya mencari kaitan dengan Teheran, kasus pengeboman Khobar Tower berhasil mencegah serangan balik secara besar-besaran.

Berbeda halnya dengan para pelaku terorisme baru yang justru secara sengaja melakukan kekerasan dengan korban yang jauh lebih banyak seperti pada Peristiwa 911 di AS. Terorisme baru ini mulai dirasakan pada 1993 saat gedung kembar World Trade Center (WTC) dibom pertama kali. Saat itu, Ramzi Yousef, si pelaku, membawa bom mobil yang kalau saja tidak berhasil dicegah, bisa menumbangkan gedung WTC dan membunuh ribuan orang. Dua tahun kemudian, teroris yang sama bermaksud meledakkan 12 pesawat penumpang Boeing 747 yang sedang terbang di atas Samudera Pasifik.

Menurut Kurt Campbell dan Michele Flournoy dalam buku *To Prevail: An American Strategy for the Campaign Against Terrorism* sebagaimana dikutip oleh Yulianti (2003), terorisme baru sangat berbeda dengan terorisme tradisional karena dilatarbelakangi masalah agama. Karakteristik terorisme baru muncul dari penggunaan simbol-simbol dan bahasa agama. Misalnya saja pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden yang mengeluarkan fatwa dan menjelaskan posisinya dengan mempergunakan istilah-istilah agama. Dalam fatwanya tahun 1998,

Osama mendesak, "*all those who believe in Allah and his prophet Muhammad must kill Americans wherever they find them*". Upaya untuk mengusir militer AS dari Teluk Persia juga dijelaskan dalam bahasa agama sebagai "*removing a blasphemy, a violation of religious law*".

Bin Laden dan kelompoknya mengutip ayat-ayat suci Al-Quran untuk membenarkan pembunuhan; sesuatu yang salah kaprah, karena Islam tak ada hubungan sama sekali dengan terorisme. Jika teroris tradisional yang sekuler biasanya memilih-milih sasaran korbannya, maka teroris berlatar agama sering berupaya memusnahkan musuhnya dalam skala besar dan habis-habisan. Bagi pelaku terorisme baru ini, kekerasan adalah tindakan suci yang didasarkan pada pemahaman atas kewajiban menjalankan ajaran agamanya dan penafsiran atas perintah Tuhan.

Bruce Hoffman, penulis buku *Inside Terrorism*, mengatakan bahwa kekerasan dianggap oleh teroris generasi baru sebagai "tugas mulia" atau "perbuatan suci". Maka, tak heran jika seorang Amrozi yang divonis hukuman mati dapat tersenyum lebar dan mengacungkan jempol tanda kemenangan. Itulah pula sebabnya mengapa Imam Samudra, yang juga dituntut hukuman mati karena keterlibatannya dalam kasus Bom Bali, juga mengucap syukur karena hukuman mati itu "akan semakin mendekatkan dirinya dengan Tuhan".

Karena dilatarbelakangi masalah keyakinan agama, terorisme baru ini juga memiliki ciri

lain, yakni kemampuannya yang luar biasa dalam merekrut pasukan berani mati. Bom bunuh diri merupakan ciri utama dari operasi jaringan teroris Al-Qaeda. Meskipun penggunaan satu atau dua pelaku bom bunuh diri rutin dilakukan oleh kelompok seperti Hizbullah, Hamas, atau Serigala Tamil Sri Lanka, jaringan Al-Qaeda telah menggunakan operasi bom bunuh diri lebih banyak dari kelompok teroris tradisional.

Dalam peristiwa pengeboman Kantor Kedubes AS di Afrika, setidaknya empat teroris tewas dalam serangan bunuh diri itu. Serangan terhadap kapal induk USS Cole juga menggunakan dua pelaku bom bunuh diri. Akan halnya serangan 11 September 2001 merupakan yang terbesar, dengan mengerahkan sebanyak 19 pelaku bunuh diri yang membajak sejumlah pesawat penumpang dan menjadikannya sebagai senjata pemusnah massal. Kasus Bom Bali, Bom Marriott, dan Bom Kuningan juga menggunakan bom bunuh diri, sehingga diduga kuat terkait operasi Al-Qaeda.

Simbol yang dijadikan sasaran serangan oleh terorisme baru ini juga penting untuk digarisbawahi. Sejak Kedubes AS di berbagai penjuru dunia makin sulit untuk diserang karena pengamanannya yang sangat ketat, maka para teroris baru mengubah sasaran ke arah yang lebih mudah (*softer target*): pusat-pusat hiburan, hotel, kafe, dan sekolah. Namun, fokusnya tetap sama dan dijaga yakni bahwa tempat-tempat itu merupakan lambang kekuatan AS dan Barat. Paddy's Cafe di Bali,

Hotel JW Marriott, dan Kantor Kedubes Australia di Kuningan, Jakarta, jelas bukan sembarang tempat untuk dibom para teroris itu.

Satu hal lagi dari terorisme baru yang ditakutkan AS adalah kemampuannya untuk melakukan serangan dengan senjata pemusnah massal, seperti senjata kimia, biologi, dan bahkan nuklir. Ini bukan hal yang mengada-ada. Kelompok sekte agama Aum Shinrikyo pernah menyebarkan gas sarin di kereta bawah tanah di Tokyo. Kesaksian-kesaksian di pengadilan menyebutkan adanya upaya-upaya kelompok terorisme baru untuk mendapatkan senjata kimia dan biologi. AS sangat yakin, Al-Qaeda akan menggunakan senjata pemusnah massal tersebut jika jaringan teroris itu sempat memilikinya (Yulianti, 2003).

Konflik Peradaban?

Berdasarkan paparan di atas, kita melihat bahwa yang kerap dan banyak menjadi sasaran kelompok teroris eksternal (dalam arti, bukan dari dalam negeri sendiri) dalam dua dekade terakhir ini adalah AS. Mengapa demikian? Sementara, yang diduga menjadi pelaku atau terorisnya adalah kelompok radikal muslim. Mengapa demikian? Adalah Samuel Huntington, yang pada 1993 secara kontroversial mengatakan bahwa masa depan politik global akan didominasi oleh konflik antarbangsa yang berbeda peradaban.^{xi}

Dalam kenyataannya, memang, di satu sisi, peradaban Barat (utamanya AS) yang modern kian lama kian menghegemoni dunia. Didorong hal itulah maka di

sisi lain cenderung terjadi penolakan atau perlawanan oleh orang-orang dari peradaban yang belum semodernis Barat tapi ingin menyaingi Barat. Dalam rangka itulah, maka mereka mengidentifikasi modernisasi sebagai westernisasi. Upaya pencitraan seperti itu tentu diharapkan dapat membangkitkan semangat penolakan atau perlawanan yang dibungkus dengan tujuan "berkompetisi".

Dalam kaitan itu, menurut Huntington, aspek agama merupakan sesuatu yang paling mudah untuk dijadikan atau dianggap sebagai "roh" peradaban. Maka, dalam rangka menolak atau melawan hegemoni Barat itu, identitas agama pun dimunculkan dan diaktifkan sehingga terjadilah pengelompokan dua kubu: Barat dan non-Barat atau Kristen dan Islam (Huntington menambahkan Konghucu dalam kubu ini). Seiring arus deras globalisasi yang mendorong terjadinya revitalisasi agama-agama, maka konflik-konflik peradaban yang didasari perbedaan agama ini pun semakin kerap dan banyak terjadi di mana-mana.

Sementara itu, terjadilah apa yang disebut Kebangkitan Islam, yang didorong maupun diperkuat pula oleh kemajuan ekonomi negara-negara Asia. Dengan bertambahnya keyakinan akan kemampuan diri sendiri, maka umat Islam pun menegaskan bahwa ajaran Islam merupakan satu-satunya sumber identitas, makna, stabilitas, legitimitas, kemajuan, kekuatan, dan harapan, yang dinyatakan melalui slogan "Islam adalah jalan keluar".

bahwa upaya memerangi teroris dan terorisme ini bukanlah merupakan kebencian terhadap atau keinginan memerangi Islam. Hal itu telah berulang kali dikatakan oleh para pemimpin di AS dan Inggris, juga oleh Dubes AS Ralph Boyce beberapa waktu lalu (*Kompas*, 26-2-2002) dan oleh Direktur FBI Robert S. Mueller usai bertemu dengan wakil Pemerintah RI, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dan Kapolri Jenderal (Pol) Da'i Bachtiar di Bali, 15 Maret lalu (*Kompas* 17-3-2002).

Dan bagi kita pada umumnya, hendaknya disadari bahwa teroris dan terorisme harus diperangi karena kelompok ini beserta ideologinya berpotensi mengancam demokrasi, hak asasi manusia, stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran yang didambakan oleh semua orang di dunia.

Catatan Akhir

ⁱ Tulisan ini merupakan makalah pengantar diskusi dalam acara "Diskusi Petang" Jurusan Hubungan Internasional, Fisipol UKI, 22 Maret 2002, yang telah dilengkapi dan disesuaikan dengan perkembangan aktual untuk dimuat dalam jurnal ini.

ⁱⁱ T. Yulianti, "Doktrin Baru Pertahanan AS" dalam *Harian Suara Pembaruan*, 15 Juli 2002.

ⁱⁱⁱ Kusnanto Anggoro, "Kerja Sama Masyarakat Internasional Vs Franchisasi Gerakan Teror" dalam *Harian Kompas*, 14 Oktober 2001.

^{iv} Onong Uchjana Effendy, *Komunikasi: Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990.

^v Umar Suryadi Bakry, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Jakarta : Probita Mitra Buana, 1996, hal 33-42. Lihat juga Walter Laqueur, "Reflection On Terrorism" dalam *The Global Agenda, Issues and Perspective*, oleh Chales W. Kegley, Jr., dan Eugene R. Wittkopf, New York: MacGraw Hill, Inc., 105-116.

^{vi} Lihat Thomas G. Paterson dkk., *American Foreign Policy, A History to Present*, Massachusetts: DC Heath and Company, 1991.

^{vii} AS nampaknya senang dengan perubahan sikap Indonesia yang dipandanginya sangat "positif" itu. Buktinya, AS kemudian memutuskan untuk membantu Indonesia sebesar 31 juta dolar untuk *training* kepolisian, 16 juta dolar untuk membangun unit antiterorisme, dan 4 juta dolar untuk *training* antiterorisme bagi TNI.

^{viii} Walter Laqueur, "Reflections on Terrorism", dalam *The Global Agenda, Issues and Perspectives*, oleh Charles W. Kegley, Jr. dan Eugene R. Wittkopf (ed.), New York, McGraw-Hill, Inc., 1992, hal. 107-108.

^{ix} Lihat uraian panjang-lebar tentang hal ini dalam Mark Juergensmeyer, *Terorisme Para Pembela Agama*, terj. Amien Rozany Pane, Yogyakarta: Tarawang Press, 2003.

^x Di penjara khusus AS di Teluk Guantanamo, sejak Peristiwa 9/11, sekitar 650 orang telah ditahan karena dianggap berhubungan dengan Al-Qaeda (meski tak ada proses hukum independen yang digunakan untuk membedakan mana yang pasukan Taliban sebagai pasukan nasional yang bertempur melawan invasi AS, dengan anggota Al-Qaeda). Menurut laporan media massa, kondisi tahanan sangat menyedihkan. Setiap orang harus tinggal dalam sel kecil hampir selama 24 jam, kecuali kalau sedang diinterogasi atau 30 menit latihan fisik selama seminggu. Sekitar 80 tahanan dimasukkan dalam sel khusus yang terbuat dari baja.

Selama ini AS menolak untuk menggunakan prinsip konvensi Jenewa untuk memperlakukan mereka sebagai tahanan perang. AS juga menolak permintaan *Inter-American Commission on Human Rights* agar memberikan pengadilan yang adil atas mereka. Bahkan, AS juga tak pernah menanggapi surat dari United Nations Working Group on Arbitrary Detention yang ingin mencari informasi mengenai perlakuan dan status hukum para tahanan tersebut.

^{xi} Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, New York: Simon and Schuster Inc., 1997.

^{xii} Walter Laqueur, "Reflection on Terrorism" dalam Charles W. Kegley, Jr. dan Eugene R. Wittkopf, *The Global Agenda, Issues and Perspectives*, New York: McGraw Hill, Inc., 1992.

Daftar Pustaka

Bakry, Umar Suryadi
1996 **Pengantar** dalam
Hubungan Internasional,
Jakarta: Probisi Mitra
Buana.

Effendy, Onong Uchjana
1990 **Komunikasi: Teori dan**
Praktek, Bandung: Remaja
Rosdakarya.

Juergensmeyer, Mark
2003 **Terorisme Para Pembela**
Agama, terj. Amien Rozany
Pane, Yogyakarta:
Tarawang Press.

Laqueur, Walter
1992 "Reflection on Terrorism"
dalam Charles W. Kegley,
Jr. dan Eugene R. Wittkopf,
The Global Agenda,
Issues and Perspectives,
New York: McGraw Hill,
Inc..

Huntington, Samuel P.
1997 **The Clash of Civilization**
and the Remaking of
World Order, New York:
Simon and Schuster Inc.

Paterson, Thomas G. *et.al.*
1991 **American Foreign Policy,**
A History to Present,
Massachusetts: DC Heath
and Company

